



## PROYEK PEMINDAHAN IKN: UPAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAUKAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI

**Fajar Satriyawan Wahyudi**

Universitas Darussalam Gontor

[fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id](mailto:fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima : 8 Juli 2023

Disetujui : 18 Juli 2023

Dipublikasikan : 25 Juli 2023

### ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan, yang didorong oleh sebagian pendapat, tercantum usaha menciptakan sistem mengatur pemerintahan yang positif serta pengembangan ekonomi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sistem tilikan deskriptif serta menyamakan kedua sebab dasar dari pemindahan ibukota. Hasil studi membuktikan jika pengembangan ekonomi mampu digeluti dalam kondisi desentralisasi serta kedaulatan teritori masa ini. Kemampuan pemindahan ibukota yang didasarkan pada pengembangan ekonomi menuntut kualifikasi kebijaksanaan hangat yang diarahkan pada pengurusan pemerintahan yang positif serta rajin. Di arah lain, pemindahan ibukota dengan tujuan memberikan sistem mengatur pemerintahan yang positif tidak cuma memberikan pengurusan pemerintahan yang positif, handal, serta visioner, namun juga bakal melahirkan kebijaksanaan yang mampu meninggikan ekonomi serta tahap kehidupan, dan juga kurangi persekongkolan, penyelewengan, serta Nepotisme (KKN). Ini akan memberikan rehabilitasi pada seluruhnya pandangan kehidupan bernegara selaku jujur serta seimbang.

**Kata Kunci :**  
Proyek Ibu Kota Baru, Pembangunan Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan

### ABSTRACT

*This article discusses the concept of moving the capital from Jakarta to Kalimantan, which is driven by some opinions, including efforts to create a system of managing positive governance and economic development. This study uses a qualitative approach with a descriptive tilikan system and equates the two basic causes of capital transfer. The results of the study prove that economic development can be carried out in conditions of decentralization and territorial sovereignty at this time. The ability to move capital based on economic development demands the qualifications of warm wisdom directed towards positive and diligent governance of government. In another direction, the transfer of capital with the aim of providing a system of managing positive government does not only provide positive governance management, , reliable, and visionary, but will give birth to wisdom that is able to elevate the economy and stage of life, and also reduce conspiracy, misappropriation, and Nepotism (KKN).*

**Keywords :**  
New Capital Project, Economic Development, Governance

### PENDAHULUAN

Jakarta adalah ibukota negara Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan (Vioya,2010), tetapi terdapat juga berbagai macam lembaga-

lembaga negara yang bertempat di Jakarta sebagai pusat bisnis dan juga perdagangan baik tingkat Nasional maupun Internasional yang selama ini telah menjalankan fungsi dan kedudukannya dengan baik. (Mauleny,2015)

Jakarta bukan hanya lambang pemerintahan negara Indonesia, tetapi juga merupakan pusat penting bagi perekonomian dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Jakarta memiliki peran penting dalam pertahanan negara secara menyeluruh. Ditetapkannya Jakarta sebagai ibukota tidak lepas dari sejarah Indonesia yang panjang dan lampau, Batavia adalah nama kota Jakarta di bawah pemerintahan Hindia Belanda, dan digunakan sebagai pusat administrasi dan komersial (Ridwiyanto,2011), sehingga pada saat itu berbagai jenis bangunan di kota Batavia mendukung kegiatan perdagangan dan pemerintahan serta struktur pemerintahan sudah berkembang dengan baik (Haris,1992).

Setelah Indonesia merdeka, Jakarta dijadikan ibu kota karena memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dan terdapat beberapa peninggalan penting zaman pemerintahan Hindia-Belanda di kota tersebut. Pindahan tempat kekuasaan pasca kemerdekaan juga lebih mudah dilakukan di Jakarta. Meskipun pada awal kemerdekaan terjadi pemindahan sementara ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta karena alasan politik dan keamanan, namun Jakarta kembali dijadikan ibu kota dan hingga saat ini tetap bertahan sebagai ibu kota Negara (LaDossa & Y, Riffi,2018)

Jakarta sebagai ibukota negara memiliki tugas dan peran yang penting, namun masih menyisakan permasalahan tersendiri. Hal ini karena Jakarta harus mengakomodasi berbagai tuntutan dan kebutuhan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Terbatasnya kota Jakarta sebagai ibukota sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dan berlanjut hingga saat ini. Banyak alasan yang menjadi dasar untuk memindahkan ibukota (Novelino,2019).

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, pemindahan ibukota didasari oleh penyebaran wabah penyakit yang mematikan yang menyebabkan banyak orang Belanda meninggal. Oleh karena itu, pada saat itu kota Jakarta dijuluki sebagai "kuburan" bagi orang-orang Belanda. Salah satu penyebabnya adalah karena Jakarta pada saat itu merupakan kota pelabuhan yang memiliki iklim yang sangat panas, sehingga menyebabkan polusi dan mudah menyebar wabah penyakit. Oleh karena itu, pemerintah Hindia-Belanda saat itu merencanakan kebijakan pemindahan ibukota (Janti,2017).

Setelah Indonesia merdeka, pada awal masa pemerintahan Presiden Soekarno, Alasan kepindahan tersebut lebih tertuju pada kondisi politik pada saat Jakarta masih banyak meninggalkan sisa-sisa masa penjajahan Hindia Belanda. Tujuan pemindahan ibukota juga untuk mendistribusikan pemerataan ekonomi dan pembangunan di setiap daerah dan wilayah, sehingga muncul nama Palangkaraya sebagai lokasi yang strategis di tengah-tengah negara Indonesia untuk dijadikan ibukota (Jati,2017).

Di masa Orde Baru saat pemerintahan Presiden Soeharto, alasan dasar yang menjadi pindahnya ibu kota lebih bersifat tertutup/internal, Jakarta yang tidak lagi dianggap efektif dan efisien lagi sebagai ibu kota sehingga perlu diganti dengan kota yang baru sebagai pusat pemerintahan tanpa menghilangkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan ekonomi Indonesia. Pada saat itu telah dikeluarkan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 1 Tahun 1997 yang mengatur tentang pertumbuhan wilayah Jonggol di Jawa Barat menjadi kota mandiri yang diarahkan untuk menjadi ibu kota baru (Haryadi,2019)

Cita-cita untuk memindahkan ibukota muncul kembali di era reformasi pada saat kepemimpinan Presiden.Susilo Bambang.Yudhoyono, yang menggagas pemindahan

ibukota di luar pulau Jawa. Kemudian, Presiden.Joko.Widodo.juga melakukan hal serupa karena mempertimbangkan bahwa pusat pemerintahan baru yang dipisahkan dari bisnis nasional saat itu harus berada di luar pulau Jawa. Langkah ini mencanangkan wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru (Ramadhan,2019).

Faktor yang mempengaruhi termasuk ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan. "Situasi sosial kemasyarakatan yang tidak optimal dan tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Jakarta diorientasikan hanya sebagai pusat perekonomian nasional semata.

Pada dasarnya, dalam era Reformasi terdapat dua alasan dasar yang digunakan untuk menilai dan menimbang keputusan pemindahan ibukota. Pertama, karena adanya keinginan untuk mendorong, mendongkrak, dan meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa sehingga terjadi perbedaan pemerataan dan pengembangan ekonomi antar pulau.

Kedua, adanya keinginan untuk menciptakan ibukota yang kondusif, akomodatif, aman, dan nyaman guna meningkatkan kualitas serta sumber daya yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan nasional berbasis administrasi yang baik, bersih, nyaman dan profesional (Deny,2019).

Selain faktor internal di Indonesia, rancangan perpindahan ibukota juga dilihat dari beberapa contoh keberhasilan pemindahan ibu kota ke negara lain, misalnya, Amerika Serikat (AS) saat ini memindahkan ibukotanya dari New York ke Washington DC. Belakangan, Brasil juga mengubah tata letak ibu kota yang dulu terletak di Salvador menjadi Rio de Janeiro . juga negara bagian Jerman yang ibu kotanya dipindahkan dari Bonn ke Berlin.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, seperti Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, telah dinilai berhasil dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia juga akan mencapai tingkat keberhasilan yang sama dengan pemindahan ibu kota negara-negara lain.(Azis,N.L., 2019).

Rencana pemindahan ibukota di atas sebenarnya berpotensi memberikan resiko dan konsekuensi tersendiri. Alasan yang dibuat atas dasar mengembangkan dan pemerataan ekonmi serta tata kelola pemerintahan yang baik akan berimplikasi kepada kebijakan atas perpindahan ibukota yang harus pula dibarengi dengan kebijakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta sistem tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang menjadi persoalan ke depan adalah model politik seperti apa yang akan diterapkan untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan tersebut, dan apakah dengan pemindahan ini akan secara otomatis memberikan keadilan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat dan dapat membenah tata kelola pemerintahan yang cenderung korup.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas korupsi , namun rencana ini masih kurang didukung oleh landasan konseptualitas yang kuat melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah melakukan beberapa kajian terkait pemindahan ibukota, namun hasil penelitian yang dipublikasikan masih terbilang sedikit, dan kajian tersebut masih menjadi perdebatan. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah umum, seperti pelayanan publik yang kurang baik

dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian ini adalah tujuan penting yang harus dikejar oleh pemerintahan serta aparaturnya untuk selalu bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

Dalam penjelasan di atas, dijelaskan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota yang baik, bersih, dan profesional harus didasarkan pada dukungan konseptualitas yang bervariasi. "Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketika sebuah kota dijadikan pusat pemerintahan, maka akan diikuti pula oleh perkembangan ekonomi dan pusat perdagangan di wilayah dan daerah yang sama. (Tjiptoherijanto,1999).

Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa pemindahan ibu kota dapat menimbulkan beberapa masalah, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk berhasil melaksanakan pemindahan ibu kota diperlukan instruksi yang akurat, cepat, dan tepat. Harapannya, instruksi tersebut dapat menerapkan model dan instrumen kebijakan pemindahan ibu kota yang benar dan sesuai.

Untuk mengatasi masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk secara mendalam mengevaluasi alasan yang seharusnya menjadi dasar untuk melakukan pemindahan ibu kota. Karena alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pemindahan ibu kota memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif dan teliti sebelum memutuskan untuk melaksanakan pemindahan ibu kota.

Artikel ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat menambah referensi mengenai alasan dasar atas pemindahan ibu kota. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang telah dilakukan untuk mengevaluasi hal tersebut. Dari perspektif masalah Jakarta sebagai ibu kota saat ini dan Kalimantan sebagai lokasi alternatif ibu kota. Sejumlah kajian mengkaji tentang alasan dasar yang menjadi pindahnya ibu kota, serta melihat pindahnya ibukota dari sudut pandang pertahanan, dan Silalahi yang melihat pemindahan ibu kota dari sudut pandang ekonomi dan resiko. Harapannya pada artikel ini dapat menambah dan mengembangkan beberapa referensi mengenai pemindahan ibu kota dari segi alasan dasar yang selama ini kurangnya kajian yang mengkaji secara mendalam tentang alasan mendasar pemindahan ibu kota tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode analisis deskriptif dalam penelitian ini. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian yang diinginkan yang menggambarkan proyek pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, analisis tentang penyebab dasar proyek pemindahan ibu kota dideskripsikan dalam bentuk deskripsi yang bermakna dalam bentuk deskripsi naratif. Selain itu, penggunaan gambar juga dilakukan untuk membantu pemahaman terhadap uraian yang disajikan.

Pendekatan kualitatif ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli di bidangnya yang menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan output berupa sebuah gambaran tentang permasalahan dasar alasan pemindahan ibukota yang berupa penggambaran dan deskripsi secara menyeluruh, real, dan alamiah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang rencana pemindahan ibu kota dan alasan dasarnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan peneliti untuk melaksanakan pemindahan ibu kota secara tepat dan efektif. Selain itu, diharapkan

hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan negara-negara lain yang tertarik untuk melakukan pemindahan ibu kota (Silalahi,2009).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Data yang diperoleh diambil dari berbagai dokumen yang dianggap sesuai dan relevan dengan tema penelitian, seperti jurnal, buku, berita, dan situs web pemerintah. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi, display atau penyajian, dan penarikan kesimpulan, yang sesuai dengan pemahaman Creswell. Tahap reduksi dilakukan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data, sedangkan tahap display atau penyajian digunakan untuk menyajikan data secara visual. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Dalam rangka memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan menerapkan teknik triangulasi, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian dapat terjamin lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama masa pendudukan kolonial Belanda di Hindia Timur, Jakarta tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga dijadikan sebagai pusat perdagangan. Kondisi saat itu tidak hanya membawa manfaat dan nilai tambah berupa dibangunnya beberapa infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dikembangkannya infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan dan niaga.

Penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perdagangan diuntungkan secara ekonomi, sosial, dan politik sebagai hasil dari sinergi penggabungan ini. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sistem perekonomian yang diintegrasikan antara pusat pemerintahan dan pusat perdagangan tetap dipertahankan disana. Menurut teori Campbell (Agassi,2013), pembangunan ibu kota yang berfungsi ebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan perekonomian dapat dilakukan sesuai visi, misi dan tujuan awal pembangunan ibu kota.

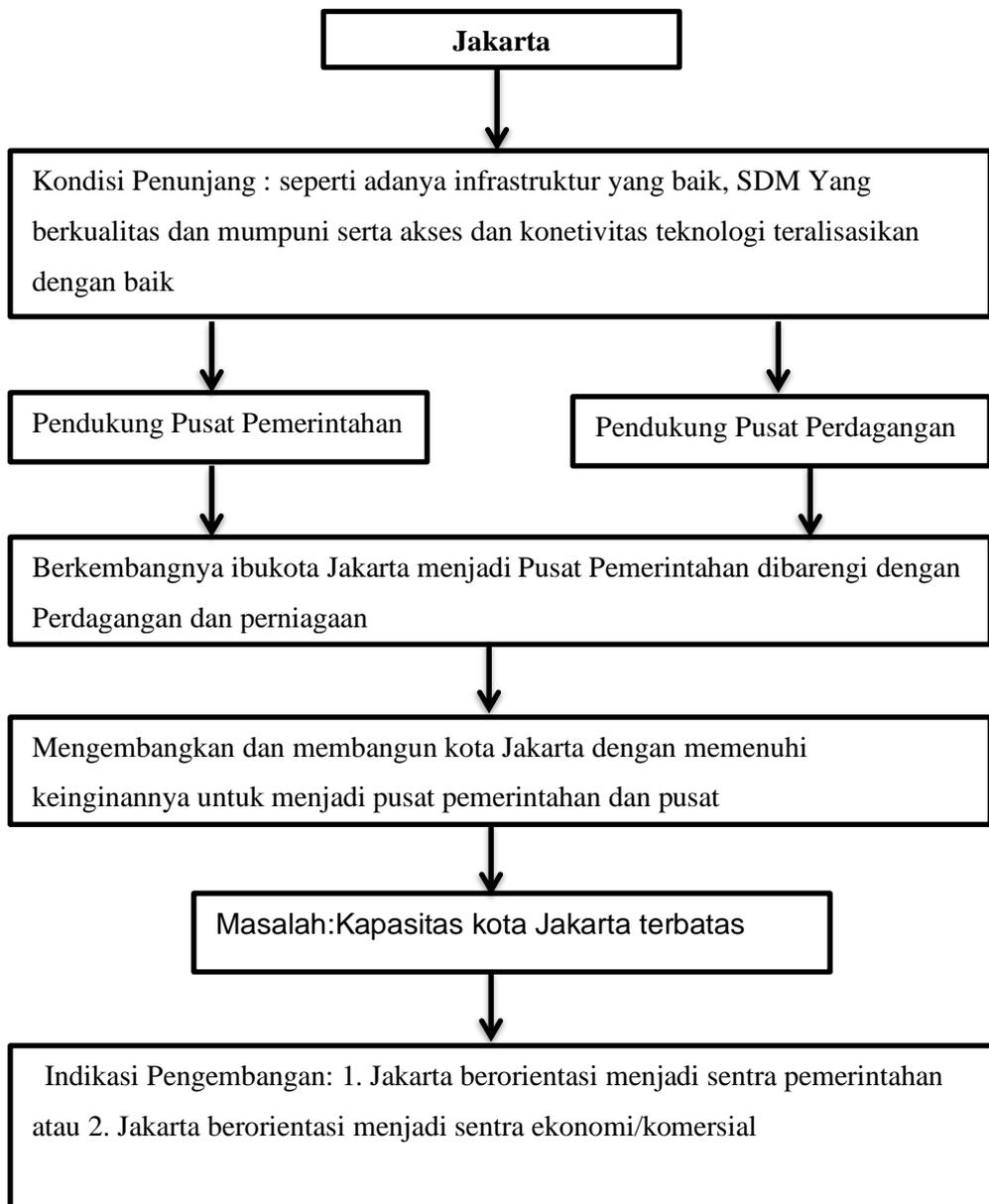
Menurut peneliti, adanya integrasi antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di suatu wilayah tertentu akan membawa keuntungan bagi keduanya. Pertama, efektivitas akan dihasilkan dari integrasi kebijakan pembangunan yang diarahkan dan ditempatkan dekat dengan jantung pertumbuhan ekonomi dan jantung pemerintahan. Kedua, pemerintah akan lebih mudah mengatur dan mengelola ekonomi karena pusat ekonomi berada di wilayah yang sama dengan pusat pemerintahan. Hal ini akan membantu perekonomian tumbuh dan berkembang sesuai dengan jalanya pemerintahan.

Ketiga, untuk mensosialisasikan sistem perekonomian, dibutuhkan dukungan kebijakan yang cepat, tepat, dan bijak. Integrasi antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di suatu wilayah tertentu dapat mendorong pemerintah untuk merespons tuntutan dan kebutuhan dalam meningkatkan perekonomian dengan lebih cepat. Namun, integrasi ini hanya akan terwujud jika pemerintah melakukan perencanaan pembangunan ibukota dengan mempertimbangkan kedua aktivitas tersebut sejak awal. Dalam proses pengembangannya, penting untuk menetapkan aturan yang jelas terkait pembagian wilayah dan otoritas kewenangan antara pengembangan pusat pemerintahan dan pusat

perekonomian. Hal ini akan mencegah adanya tumpang tindih kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

Proses penyatuan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang berlangsung di Jakarta sebagai ibu kota memang tidak direncanakan sejak awal. Hal ini terlihat pada kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang hanya ditujukan untuk menampung maksimal 600.000 hingga 1 juta jiwa. Namun, Jakarta kini dihuni oleh lebih dari 10 juta orang.

Permasalahan tersebut menyebabkan terbatasnya pengembangan kapasitas Jakarta, yang menghasilkan berbagai masalah, Masalah-masalah yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota mencakup aspek ekologi, seperti sanitasi air yang buruk dan polusi udara, serta aspek sosial, seperti tingginya jumlah masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh dan padat penduduk.



**Gambar 1. Ibukota Jakarta berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan**

Sumber: Analisis Peneliti 2023

Namun demikian, relokasi pusat pemerintahan juga bukanlah solusi yang mudah karena akan memerlukan biaya yang sangat besar serta membutuhkan waktu yang lama untuk membangun infrastruktur baru dan memindahkan seluruh instansi pemerintahan ke tempat yang baru. Selain itu, relokasi pusat pemerintahan juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.

Sebagai alternatif, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang berfokus pada pengembangan kota-kota lain di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Salah satu cara untuk mendorong investasi di kota-kota lain dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut adalah dengan memberikan insentif dan membangun infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pembangunan secara terpadu antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Jakarta dan sekitarnya. Dalam hal ini, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan tepat agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, pengembangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian tidak dapat dipisahkan dari kondisi pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia, aksestabilitas dan konektivitas teknologi. Perlu dilakukan perencanaan dan kebijakan yang tepat agar pengembangan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional (Baroroh,2012).

Memindahkan pusat pemerintahan agar Jakarta berorientasi sebagai pusat perekonomian dinilai sebagai opsi yang tidak terlalu berisiko. Beban mengakomodir fungsi pemerintah pusat tidak ada di Jakarta. Pemahaman ini sejalan dengan rencana kebijakan pemerintah untuk memindahkan Jakarta sebagai kendala terbatas atas perkembangan kota sebagai ibu kota (Yadika,2019).

Meskipun Jakarta memiliki ketergantungan terhadap kapasitas, pemerintah tidak dapat menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk memindahkan ibukota. Menurut para peneliti, ada beberapa alasan mengapa hal ini tidak dapat dilakukan. Pertama, menggunakan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibukota akan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merencanakan konsep ibukota yang ideal dan konseptual dari awal. Selain itu,

Dalam pengambilan kebijakan pemerintah, pemindahan ibukota berdasarkan masalah internal Jakarta menunjukkan pola empiris-reaktif yang menunggu munculnya berbagai masalah sistemik sebelum memunculkan gagasan kebijakan pemindahan ibukota. Idealnya, Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di masa depan, pemerintah harus secara periodik membuat proyeksi pembangunan Jakarta dan menerapkannya dalam instrumen kebijakan pengembangan ibukota.

“Jakarta masih dianggap matang dalam hal penyelenggaraan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Diharapkan dengan pemindahan ibu kota baru, wilayah tersebut dapat menjadi lebih unggul dan maju dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat alasan yang menunjukkan bahwa Jakarta tidak lagi layak menjadi ibukota, maka pemindahan ibu kota menjadi sebuah pilihan yang harus dipertimbangkan.

Untuk mempertimbangkan pemindahan ibu kota secara konkret, rinci, dan jelas, perlu dilakukan evaluasi yang meliputi berbagai aspek penunjang penyelenggaraan pusat

pemerintahan. Pertimbangan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada masalah sektoral atau politik semata, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. (Utami,2018).

Untuk memastikan keberhasilan pemindahan ibukota, perencanaan harus dilakukan dengan cermat, multidimensi, komprehensif, dan berorientasi ke depan. Hal ini akan memungkinkan pembangunan ibukota yang ideal, yang dapat disesuaikan dengan segala potensi dan permasalahan yang mungkin terjadi. Meskipun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan pembangunan, namun mereka belum mampu menghasilkan output yang komprehensif terkait landasan, orientasi, konsep, dan pemetaan wilayah pemindahan ibukota. Padahal, rencana pemindahan ibukota telah bergerak untuk waktu yang cukup lama. Akibatnya, kajian terkait pemindahan ibukota baru dilakukan secara internal oleh pemerintah.

Padahal, alasan yang mendasari pemindahan tersebut, yakni keinginan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, masih berdasarkan pendapat beberapa ahli dan bukan hasil riset pemerintah. Selama ini, pemerintah memindahkan ibu kota setidaknya untuk dua alasan utama, yaitu: Pertama, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengupayakan tata kelola pemerintahan yang profesional, tertib, dan baik. Dua alasan ini, jika dipusatkan dari atas ke bawah, memiliki konsekuensi yang beragam, baik untuk kemungkinan ibu kota lain maupun untuk pengaturan instrumen dalam contoh strategi yang harus dijadikan saran untuk migrasi ibu kota. Padahal, kedua motif ini saling bermusuhan. Dua faktor yang menyebabkan perpindahan modal dapat dianalisis sebagai berikut:

#### **Pemerataan dan pembangunan ekonomi menjadi dasar mobilitas modal.**

Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki program dan strategi yang jelas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai tujuan yang harus dicapai. Program-program tersebut dapat meliputi pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata di daerah-daerah tertinggal atau terisolasi. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat kerja sama antar daerah dalam rangka menciptakan sinergi dan Diperlukan upaya buat mendorong pertumbuhan ekonomi yg merata pada semua daerah di Indonesia . Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus atau peningkatan aksesibilitas antar daerah (Wibowo,2008).

Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat sebagai koordinator dan fasilitator sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sejalan dengan tujuan nasional dan memperkuat integrasi ekonomi nasional (Firdaus,2013). Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan utama pemerintah, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Pemahaman tentang konsep "Jawanisasi" yang menganggap Pulau Jawa sebagai sentral dari pembangunan nasional merupakan salah satu implikasi dari kurangnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang pesat hanya terjadi di Pulau Jawa sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan dirasakan lambat karena kurangnya penyebaran hasil alam dan perdagangan yang selama ini hanya difokuskan di Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga terjadi pemahaman bahwa Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan nasional.

Implikasi lainnya adalah munculnya migrasi besar-besaran ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi yang membaik, hal ini pada akhirnya akan memperparah disparitas pembangunan antara Jawa dan Jawa serta daerah lainnya (Kementerian Keuangan,2017).

Pulau Jawa tidak hanya mengalami perkembangan pesat, tetapi juga berkontribusi terhadap urbanisasi penduduk yang mengakibatkan sekitar 150,4 juta dari 266,91 juta penduduk Indonesia tinggal di sana. Pulau Jawa masih memberikan kontribusi sekitar 59,03 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan hingga saat ini sangat dominan (Badan Pusat Statistik,2013).

Memang benar bahwa rencana pemindahan ibukota dapat menjadi kesempatan untuk mengubah pola pembangunan yang selama ini cenderung mengarah pada "Jawanisasi" atau pembangunan yang hanya fokus pada pulau Jawa. Namun, untuk mencapai pembangunan yang terdesentralisasi, diperlukan upaya yang komprehensif dan tidak hanya bergantung pada pemindahan ibukota saja.

Pemerintah perlu mengembangkan strategi dan kebijakan yang jelas dan komprehensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di luar pulau Jawa, tetapi juga di daerah-daerah yang terletak di dalamnya. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, termasuk di dalamnya pengembangan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi. "Pemindahan ibu kota hanyalah salah satu bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas" dan harus dipertimbangkan secara hati-hati terkait dengan dampak dan implikasinya pada seluruh wilayah Indonesia.

Pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa tidak dapat menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pembangunan di wilayah di luar pulau Jawa, seperti investasi, infrastruktur, aksesibilitas, sumber daya manusia, regulasi, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa harus dilakukan dalam konteks strategi pembangunan yang lebih komprehensif, yang mencakup pengembangan infrastruktur dan fasilitas, pembukaan peluang investasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan stabilitas politik.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemerataan dan pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan kebijakan yang holistik dan komprehensif, termasuk dukungan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah-daerah tertentu. Pemindahan ibukota dapat menjadi bagian dari upaya tersebut, namun bukan solusi utama yang dapat menyelesaikan semua masalah ketimpangan pembangunan di Indonesia (Wiwoho,2017).

Pembangunan di luar pulau Jawa juga sudah dilakukan meskipun belum secepat dan sebesar yang dilakukan di pulau Jawa. Namun, tujuan pemindahan ibukota yang secara langsung dikaitkan dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan di luar pulau Jawa harus didasarkan pada analisis yang mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi dari pemindahan tersebut dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan keputusan pemindahan ibukota berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terukur.

"Kedua, untuk menjamin kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah harus memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya difokuskan

pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, serta dukungan bagi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Kebijakan pemerataan ekonomi seharusnya tidak tergantung pada perpindahan modal atau pemindahan ibukota, namun harus didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan, seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan mengembangkan potensi sektor ekonomi di luar Jawa. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing daerah, dan secara bertahap mengurangi ketimpangan ekonomi antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Pemerataan dan pembangunan ekonomi harus dilihat sebagai alat negara yang dilakukan secara terus menerus, tanpa memandang skala waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia dari saat ini hingga masa depan secara konsisten.

Dengan cara yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, agenda pemerataan ekonomi yang dilakukan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah langkah yang tepat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam membuat perencanaan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan perekonomiannya sendiri, sehingga tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat.

Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, setiap daerah berhak mengatur rumah tangganya secara lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, membangun infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Dalam konteks pemindahan ibu kota, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga dapat memastikan bahwa pembangunan di daerah sekitar ibu kota baru dapat berjalan seiring dengan pembangunan di ibu kota baru itu sendiri.

Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan fasilitasi yang memadai bagi daerah-daerah tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Dengan cara ini, daerah dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. sehingga tercipta pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia (Angkasa,2017). Mewujudkan pemerataan perekonomian tidak harus menunggu pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa untuk dilaksanakan, khususnya pemerataan pembangunan antara pulau Jawa dengan daerah di luar Jawa. Keadilan ekonomi harus dicapai secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui kebijakan dan program yang tepat.

Pemerintah dapat memperkuat perekonomian daerah di luar pulau Jawa dengan mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, serta mengembangkan industri yang berbasis pada potensi daerah setempat. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat, daerah-daerah di luar pulau Jawa dapat tumbuh dan berkembang secara

ekonomi,”sehingga tercipta kesetaraan pembangunan antara pulau Jawa dan daerah-daerah di luar pulau Jawa secara bertahap dan berkelanjutan.”

Ketiga, Pemindahan ibu kota sesuai dengan pemerataan ekonomi memang memerlukan pemilihan lokasi yang tepat berdasarkan faktor geoekonomi. Lokasi baru harus dipilih berdasarkan kawasan dengan potensi ekonomi yang dapat tumbuh secara merata dan belum mendapat perhatian pembangunan yang cukup. Dengan demikian, pemindahan ibu kota dapat membantu mengembangkan kawasan-kawasan tersebut sehingga tercipta kesetaraan pembangunan antara pulau Jawa dan daerah-daerah di luar pulau Jawa secara merata.

Namun, selain mempertimbangkan faktor geoekonomi, pemerintah juga harus memastikan bahwa lokasi baru memiliki poros strategis yang dapat mendistribusikan manfaat secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan membangun infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga mudah untuk mengakses wilayah tersebut dan menghubungkannya dengan wilayah lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa penduduk di sekitar lokasi baru dapat menikmati manfaat dari pemindahan ibu kota, seperti terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya daya beli masyarakat setempat.”Dengan demikian, pemindahan ibu kota dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam konteks pengembangan perekonomian, pemindahan ibu kota dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dapat menciptakan pemerataan perekonomian dan mendukung UMKM. Namun, pemerintah juga harus memfokuskan instrumen kebijakan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di lokasi baru agar ibu kota yang baru dapat berkembang menjadi pusat perekonomian baru seiring dengan perkembangan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, hal ini dapat menjadi ironi karena fungsi pemerintahan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, dan keinginan untuk tidak menggabungkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi mungkin terlihat lebih tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan perekonomian dan fungsi pemerintahan dapat berjalan seiring dan seimbang di lokasi baru, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pemerintahan dalam pemindahan ibu kota. Dengan demikian, pemindahan ibu kota dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan pemerataan perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di suatu kota atau wilayah dapat memicu pertumbuhan kota tersebut secara keseluruhan. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di suatu daerah, akan muncul kebutuhan untuk adanya investasi, lapangan kerja, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini akan meningkatkan daya tarik daerah tersebut bagi investor dan masyarakat untuk tinggal di sana, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kota tersebut.

Oleh karena itu, jika ibu kota baru didirikan di suatu daerah dengan potensi ekonomi yang besar dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sekitarnya. Namun demikian, penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara merata dan adil bagi seluruh masyarakat, tidak hanya terpusat pada kelompok-kelompok tertentu atau kawasan-kawasan tertentu saja (Makkelo,2017).

Dengan memindahkan ibukota ke kawasan dengan potensi perekonomian yang kurang berkembang, pemerintah dapat memicu tumbuhnya sektor-sektor baru dan

meningkatkan daya saing daerah tersebut. Dengan membuka peluang investasi dan memberikan lapangan kerja baru, hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemindahan ibukota ke kawasan yang kurang berkembang dapat membantu mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap Jakarta dan Pulau Jawa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong diversifikasi perekonomian nasional dan memperkuat integrasi ekonomi antar daerah di Indonesia. Pemindahan ibukota juga dapat memperbaiki kualitas infrastruktur dan layanan publik di daerah yang baru menjadi ibukota. Pemerintah akan terdorong untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendukung perekonomian, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Hal ini akan berdampak positif pada kelancaran transportasi dan logistik, sehingga memudahkan pergerakan barang dan jasa antardaerah.

Pemindahan ibukota ke kawasan yang kurang berkembang juga dapat mempercepat pengembangan sektor pariwisata. Sebagai contoh, beberapa kawasan yang diusulkan sebagai calon ibukota baru memiliki potensi alam dan budaya yang masih belum terekplorasi dengan baik. Tempat ini bisa dijadikan sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dengan berbagai cara, seperti meningkatkan fasilitas akomodasi, mempromosikan budaya lokal dan kuliner khas daerah, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata. Selain itu, pengembangan pariwisata juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, dengan membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Hal ini dapat mendorong tumbuhnya sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah tersebut.

Namun demikian, pemindahan ibukota yang didasarkan pada alasan pemerataan perekonomian juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi dengan baik. Salah satunya adalah risiko kemacetan lalu lintas dan urbanisasi yang tidak terkendali di sekitar ibukota baru. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah setempat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.

Kedua, alasan untuk memindahkan ibu kota adalah mengembangkan perekonomian dengan membawa semangat dan dorongan bagi daerah sekitar ibu kota baru dan daerah lain untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Ketiga, Dasar pemikiran pemindahan ibu kota berdasarkan pemerataan ekonomi akan menciptakan kawasan ibu kota yang seimbang secara geoekonomi jika berdasarkan pemerataan ekonomi,

Maka dari itu lokasi ibu kota baru harus dipilih dengan cermat untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, lokasi tersebut juga harus mempertimbangkan faktor geografis, lingkungan, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, diharapkan ibu kota baru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Membangun good governance sebagai basis mobilitas pengelolaan pemerintahan yang baik**

Salah satu penyebab rencana pemindahan ibu kota tersebut karena aparatur pemerintahan yang ada saat ini tidak efisien. Terdapat berbagai patologi birokrasi yang meliputi rendahnya kualitas aparatur pemerintah, rendahnya kualitas layanan publik, dan

kurangnya informasi yang disediakan kepada masyarakat. hingga praktik illegal seperti korupsi dan suap masih marak di birokrasi saat ini (Hamirul,2017). Kesadaran akan persoalan di atas semakin mendesak agar perencanaan pemindahan Ibu Kota didasarkan pada tujuan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sehingga berbagai persoalan tata kelola, terutama birokrasi yang ada sebelumnya, dapat segera dihilangkan atau dikurangi.

Tujuan pengalihan biaya berdasarkan terwujudnya good governance dapat memberikan optimisme bahwa ibu kota baru mampu menjadi kota yang ideal untuk penyelenggaraan pemerintahan disamping keinginan untuk menghilangkan permasalahan tersebut. Berikut alasannya menurut peneliti: Pertama, pemerintah harus memiliki pola perencanaan dan pembangunan ibu kota yang visioner guna mewujudkan good governance dalam rencana pemindahan ibu kota. Di mana pusat pemerintahan baru harus mampu menangani semua ketegangan dan kebutuhan masyarakat serta menghadapi hambatan di masa depan.

Dengan demikian, kebutuhan dasar untuk pengelolaan pemerintahan saat ini hingga pengelolaan pemerintahan yang akan datang dapat diperhitungkan dalam pembangunan ibu kota baru nanti. Kedua, dasar pemikiran penerapan good governance dalam rencana pemindahan ibu kota adalah pemerintah harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip good governance. Seperti open government, transparansi, kesetaraan, visi, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi waktu dan kerja, akuntabilitas (Arisaputra,2013) sebagai anchor point dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pemerintah Dalam pemindahan ibu kota, patologi birokrasi dapat terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang sebenarnya.

Hal ini sangat penting karena pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah harus mendengarkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak seperti akademisi, masyarakat sipil, dan perwakilan daerah yang akan terdampak langsung oleh keputusan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya dari daerah yang akan menjadi ibu kota baru. Pemerintah harus memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak merusak budaya dan kearifan lokal yang ada, melainkan justru dapat memperkuat dan mempromosikan keunikan dan kekayaan budaya yang ada di daerah tersebut.

Kemudian pemerintah juga harus memperhatikan aspek keuangan dari pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota akan membutuhkan anggaran yang besar dan harus dikelola dengan baik untuk menghindari terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak merugikan keuangan negara dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota, pemerintah juga harus terbuka dan akuntabel terhadap setiap kebijakan yang dijalkannya. Hal ini tidak hanya akan membangun kepercayaan publik dan sosial terhadap pemerintah tetapi juga meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan pemindahan ibu kota yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa kini akan tercipta jika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Ketiga Dasar pemikiran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota mendorong pemerintah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota baru dan mengurangi pemerataan ekonomi yang murni material yang ada antara pulau Jawa dengan dunia luar di luar Jawa, namun

pemerintah harus mampu membangun seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan berkualitas di setiap daerah saat ini, sehingga tercapai pemerataan ekonomi baik bagi alam maupun UMKM.

Keempat, pemerintah harus menyeleksi pejabat pemerintah yang akan bekerja di ibu kota baru secara bersih, visioner, dan profesional guna mewujudkan good governance dalam rencana pemindahan ibu kota. Kompetensi dan kemampuan profesional PNS yang akan bekerja di wilayah ibu kota baru sangat diperlukan. Sehingga diharapkan pemerintah daerah ibu kota baru mampu menyediakan dan membangun birokrasi yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan pengertian di atas, maka strategi pemindahan ibu kota harus didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan good governance. Namun, jika pemerintah didasarkan pada motif-motif tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul sejumlah persoalan. Para peneliti mengatakan bahwa berbagai isu tersebut antara lain: Pertama, seberapa jelas gagasan tentang tata kelola, sehingga Anda dapat memutuskan tata kelola seperti apa yang ingin Anda buat. Hal ini didasarkan pada banyaknya konsep governance yang diungkapkan oleh para ahli dan lembaga resmi saat ini.

Pemahaman konsep dasar good governance terkait pemindahan ibu kota menjadi penting karena mendasari pemikiran pemindahan ibu kota yang akan mempengaruhi keberhasilan pemindahan ibu kota yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, tentang kejelasan konsep tata kelola yang harus dikembangkan dalam proses penggalangan dana. Oleh karena itu, persoalan selanjutnya menyangkut metode yang akan diterapkan untuk dapat membangun dan Mengkonsep tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan agar pembangunan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pemindahan ibu kota dapat berhasil dilaksanakan. Ini juga berkaitan dengan bagaimana gagasan governance dipraktikkan, apakah hanya melibatkan birokrasi pemerintah yang akan menggerakkan ibu kota atau seluruh elemen pemerintah dan pihak luar yang akan menggerakkan ibu kota secara langsung.

Serta bagaimana pelaku atau pemangku kepentingan lainnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan selama penerapan tata kelola yang baik. sehingga harapan dan tujuan awal transfer modal berdasarkan good governance dapat terwujud. Ketiga, kemudian muncul persoalan bagaimana menerapkan skala prioritas, mengingat banyaknya prinsip clean and good governance yang harus diterapkan dan juga dilaksanakan. Tentunya Pemerintah akan menjadikan kedua kebijakan tersebut sebagai prioritas untuk dilaksanakan dan menjadi program utama pemindahan ibu kota apabila pemindahan ibu kota didasarkan pada upaya untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Prinsip mana yang akan diprioritaskan untuk diimplementasikan terlebih dahulu oleh pemerintah untuk mencapai good governance.

Pertama tentang profesionalisme birokrasi, di mana pemerintah memastikan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pemindahan ibu kota dipilih secara profesional, atau memiliki prinsip, serta prioritas mutlak yang akan menjadi agenda pemerintah dalam pemindahan ibu kota. Pemahaman ini sangat penting karena, dalam hal pemindahan ibu kota, banyak faktor yang perlu diperhitungkan, dan banyak dari faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Akibatnya, pemerintah memiliki kebijakan penetapan skala prioritas yang mengutamakan faktor atau prinsip tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. mulai dengan mempengaruhi dimensi lain.

### **Konsekuensi dan Resiko dari Kedua Alasan Dasar Pemindahan Ibukota bagi Keberlangsungan Ibukota Baru**

Penjelasan di atas tentang dua alasan perpindahan modal membantu orang memahami bahwa pencapaian tata pemerintahan yang baik dan pencapaian pemerataan ekonomi memiliki konsekuensi masing-masing, baik positif maupun negatif. Jika pemerintah mengambil pembangunan dan keadilan ekonomi sebagai dasar mobilitas pemindahan ibukota, Pertama, dampak positif yang mungkin terjadi pada DKI Baru adalah kepastian pertumbuhan ekonomi di Daerah Ibu Kota Baru dan pembangunan ekonomi baik di sekitar Daerah Ibu Kota Baru maupun daerah lain di Indonesia.

Dengan demikian, hal itu membangkitkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Selain itu, berbagai perangkat kebijakan yang akan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, serta aparatur pemerintah. Dalam pemindahan ibu kota, lembaga negara dan entitas pemerintah lainnya yang beroperasi di wilayah baru akan difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan pembangunan yang diharapkan dari relokasi tersebut.

Kedua, meskipun persoalan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terbatas pada pemerataan ekonomi tetapi juga mencakup berbagai aspek. namun dampak negatif yang mungkin terjadi bagi ibu kota baru, khususnya akibat alasan pemindahan modal berdasarkan pemerataan ekonomi, akan menjadi minimal. “kebijakan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta membangun aparatur pemerintahan yang bersih, visioner, dan profesional merupakan isu yang perlu dilanjutkan.”

Berikut beberapa kemungkinan ibu kota baru jika pemerintah menggunakan tujuan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar pemindahan ibu kota: Pertama, ibu kota baru akan diuntungkan dengan berdirinya pusat pemerintahan dengan birokrasi yang menjunjung tata kelola prinsip.

Aparatur pemerintahan akan dipilih dan diseleksi secara profesional, terbuka, transparan dan berwawasan ke depan. Isu yang akan menjadi kebijakan pemerintah pendudukan ibu kota baru tidak terbatas pada isu pemerataan ekonomi saja tetapi juga banyak isu kompleks lainnya. Sehingga berbagai permasalahan yang menjadi permasalahan di ibukota sebelumnya mencoba untuk diselesaikan dan tidak akan terjadi di kawasan ibukota baru.

Kedua, banyak kebijakan yang memungkinkan masyarakat tidak saling fokus. Artinya, ibu kota baru memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebagai pusat pemerintahan baru karena tujuan pemindahannya adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki banyak aspek, yang banyak di antaranya harus masuk dalam agenda kebijakan pemerintah di tahun baru wilayah ibu kota. Faktor lainnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mendirikan ibu kota baru dengan bantuan birokrasi yang menjunjung prinsip good governance. Hal ini karena banyak persoalan dalam good governance, seperti membuat pejabat pemerintah lebih terbuka dan profesional serta bekerja sama dengan aktor lain yang perlu terbuka dan akomodatif.

“Pemerintah perlu memperhatikan baik alasan maupun dampak dari pemindahan ibu kota yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar alasan dasar yang menjadi dasar rencana pemindahan ibu kota mampu secara efektif menyelesaikan masalah dan tantangan yang ada. Hal ini juga bercermin dari Pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di negara lain juga menunjukkan adanya permasalahan yang masih tersisa. Permasalahan ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk diperhatikan

agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam pemindahan ibu kota di Indonesia. melalui tabel berikut ini :

**Tabel 1. Permasalahan Akibat Pemindahan Ibukota**

<b>Negara</b>	<b>Ibu Kota</b>	<b>Permasalahan</b>
Nigeria	Abuja	Pada tahun 1991, populasi hanya sekitar 700.000 jiwa, namun pada tahun 2006, jumlah penduduk meningkat drastis menjadi 6 juta.
Myanmar	Naphydaw	Lokasinya yang jauh dari pusat kegiatan di Yangon membuat wilayah tersebut relatif sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat serta perekonomian nasional.
Mesir	Timur Kairo	Menhabiskan Biaya yang sangat tinggi
Malaysia	Putrajaya	Hanya menggunakan status penempatan ibukota saja, sedangkan wilayah sepi tidak seperti di kuala lumpur

Sumber : Diolah Dari Fajar (2023)

Berdasarkan tabel di atas, isu-isu yang timbul dari pemindahan ibukota yang telah diselesaikan di berbagai negara harus ditangkap oleh otoritas publik sehingga tidak ada masalah perbandingan dalam proses pemindahan ibukota yang ada di Indonesia. Yang terakhir dalam uraian tentang dasar pemikiran pemindahan ibukota adalah antara dua alasan, yaitu pemerataan ekonomi dan alasan tercapainya pemerintahan yang baik, kesimpulan dari hasil penelitian diatas bahwa alasan yang kedua adalah alasan yang tepat dan cermat untuk menjadi alasan dasar pemindahan ibukota demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan professional agar berguna untuk keberlangsungan Indonesia di masa depan.

Hal ini tidak hanya didasarkan pada persepsi bahwa pemindahan ibu kota harus memiliki visi, misi, dan tujuan ke depan, bukan hanya lokal, persoalan kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan 'kewajaran', tetapi juga kesadaran bahwa pemindahan ibu kota harus didasarkan pada komitmen pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang kompeten dan profesional. hanya pertumbuhan, yang saat ini menjadi masalah tata kelola. Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan akan jauh lebih besar, sehingga ibu kota baru harus mampu mengatasi segala ketegangan yang mungkin timbul, menjawab setiap tantangan yang mungkin timbul, dan tumbuh menjadi negara yang maju, ideal, dan ibukota negara Indonesia yang sedang berkembang. Landasan untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya birokrasi yang tertata dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya rencana pemindahan ibu kota juga harus dibarengi dengan birokrasi yang kompeten dan kebijakan yang visioner. Pemerataan ekonomi tentunya harus diupayakan oleh pemerintah dalam rekonstruksi kekuatan material antara pemerintah dan pemerintah daerah saat ini. Dengan pemahaman tersebut, saat yang tepat untuk mengembangkan instrumen kebijakan baru dan mendorong pemerataan ekonomi melalui rekonstruksi ekonomi dan otonomi daerah tanpa menunggu pemindahan ibu kota.

Agar pemindahan ibu kota tidak hanya sebatas pemindahan pusat pemerintahan tetapi juga harus masih dalam koridor semangat perubahan dan kepentingan bersama,

pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek arah perencanaan yang kompleks dan sistematis ketika merencanakan pemukiman kembali. mewujudkan birokrasi pemerintahan yang kompeten yang menganut prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan setiap aspek administrasi sehari-hari dalam mengejar tujuan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, MI (2013). Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan reforma pertanian di Indonesia. *Majalah Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.
- Agassi, E. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan Ibukota nasional. Institut Pertanian Bogor. Adi, E. T.(2009). Layanan Kebersihan yang Buruk: Asal Usul Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 76–87
- Aziz, N.L. L. (2019). Relokasi ibu kota: pelajaran yang dipetik dari negara lain. *Jurnal Studi Area*, 9(2), 37–64. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>
- Baroroh, U. (2012). Analisis Sektor Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine. *Jurnal Etika*, 11(2), 180–195. <https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892>.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Perkiraan jumlah penduduk Indonesia 2010-2035*. Ibukota Jakarta:Badan Pusat Statistik.
- Crewell, J. W. (2007). Survei kualitatif dan desain studi: Pilih dari lima pendekatan. Seribu Oak: publikasi bijak
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2019). Pemukiman dan urusan di seluruh Ciliwung. Diakses 21 Juni 2019 dari <http://dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-danperhasilan-ciliwung/>.
- Chandra, AA (2019, 30 September). Pansus memindahkan nilai kajian Bappenas ibu kota yang belum selesai. *detik.com*. <https://finance.detik.com/properti/d4727464/pansus-moving-mother-city-value-study-bappenas-not-complete>.
- Deny, S. (2019, 2 Juni). Ini adalah Alternatif Ibukota Baru versi Bappenas untuk standar Jakarta. *Sampul 6*. <https://www.liputan6.com/business/read/3981770/ini-standard-ibu-kotabarupengganti-jakarta-versi-bappenas>.
- Firmansyah, D., & Tjahjani, A.R. saya. (2012). Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Area (Studi Kasus Jalan Lenteng Agung, Bengkel Teknik Konstruksi Nasional UMS 2012 (hlm. 134–140). Surakarta.
- Firdaus, M. (2013). Pembangunan tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hamiroul. (2017). Penyakit birokrasi memanifestasikan dirinya dalam perilaku birokrasi disfungsi. Otorisasi: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 14–18. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330>
- Haris, T. (1992). Bentuk kota Jakarta pada abad 16 dan 18: Pelajari data peta. *BPPS-UGM*, 5(2A), 367–378.
- Haryadi M. (2019, 30 April). Jonggol Nyaris Jadi Ibukota NKRI di Era Baru Pujian,

- Kenapa Akhirnya Dibatalkan? Bahkan dengan keputusan presiden. Tribunnews.com <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/jonggol-nyaris-jadi-ibu-kotari-di-era-ode-baru-kenapa-finally-batal-padahal-already-ada-decree>.
- Kementrian Keuangan. (2017, 20 November). Membangun infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan. Kemenkeu.go.id. [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan\\_infrastruktur\\_untuk\\_pengurangan-kelimpangan/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan_infrastruktur_untuk_pengurangan-kelimpangan/).
- Janti, N. (2017, 11 Juli). Rencana pemindahan ibu kota ke Surabaya. Sejarah. Majalah Transformasi 8(1), 2022 | 26 <https://historia.id/politik/articles/plan-ibukota-transfer-ke-surabaya-v54g4> Janti, GP (10 April 2017). Ingat mimpi Soekarno di Magic Palangkaraya untuk menjadi ibu kota. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/economy/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota>
- La Dossa, Y., & Riffi. (2018, Juli 203). Sejarah Jakarta: Peran Gubernur Jakarta dalam Peristiwa Rengasdengklok. Tagar.id. <https://www.tagar.id/cerita-jakarta-perangubernur-jakarta-di-events-rengasdengklok> Mauleny, A. T.(2015). Sebuah aglomerasi,. Jakarta Journal of Socio-Economic Development and Change Policy Economics and public policy, 6(2), 147–162.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VI(1), 1–18. Makkelo, I. D.(2017). Sejarah Perkotaan: Tinjauan Tematik dan Sejarah. Tujuan Kebudayaan: Jurnal Ilmu Budaya, 12(2), 83–101. <https://doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3052>.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami penelitian literatur dalam penelitian kualitatif. Jurnal Wacana, 13(2), 177–181. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Novelino, A. (2019, April 29). Sejarah Perpindahan modal sejak zaman Hindia Belanda. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/history-relocation-capital-city-since-the-Dutch-Indies>.
- Risal, M. (2016). Kearifan lokal dalam pembentukan daerah otonom baru di era otonomi daerah (Studi kasus: kearifan lokal di wilayah Apau Kayan Kabupaten Malinau). Jurnal Reformasi Administrasi, 4(2), 106–126. <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.597>.
- Rangkasa, E. (2017). Melaksanakan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kosakata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 617–636. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i1.98>
- Ridwiyanto, A. (2011). Batavia Sebagai Kota Perdagangan Pada Abad XVII s/d XVIII (Nomor Publikasi 0112-01-10989) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repositori Uinjkt.festival
- Ramadhan. (2019, 30 April). Rencana pemindahan ibu kota: Dari zaman Soekarno sampai Jokowi. Anggapan. <https://www.assumption.co/post/plan-moving-capital-city-from-erasoekarno-to-jokowi>
- Solikhudin. (2017). Implementasi Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. Al-Da.ulah, 7(1), 163–187.

- Silalahi U. (2009). Metode penelitian sosial. Bandung: PT. Aditama Refika.
- Silitonga, D. OnlineP.Y. (2010). Tahapan perkembangan perkotaan Jabodetabek didasarkan pada perubahan aspek lingkungan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 21(3), 197–214.
- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pembangunan perkotaan di Indonesia. *Semuanya*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp.12484>.
- Utami, R.P. (2018). Dinamika kekhususan provinsi Jakarta sebagai ibu kota negara. (Publikasi No. 0112-01-10989) [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Uinkt dari repositori. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY PUTRI UTAMI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY_PUTRI_UTAMI-FSH.pdf)
- Vioya, A. (2010). Tahapan pembangunan kota. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 21(3), 215–226. Wibowo, E. (2008). Pengembangan perencanaan dan strategi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(1), 16–24.
- Wiwoho, B. (2017, 11 September). Gaya khas Jokowi adalah "daripada" gaya Soeharto dalam pembangunan infrastruktur. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/bedagaya-jokowi-daripada-soeharto-membuild-infrastruktur>.
- Yadika, B. (2019, 9 Mei). Kepala Bappenas menjelaskan pentingnya pemindahan ibu kota. *Sampul 6*. [https://www.liputan6.com/business/read/3961343/head-Jurnal Transformatif 8\(1\), 2022 | 30 Bappenas-jelaskan-pentingnya-pindah-modal](https://www.liputan6.com/business/read/3961343/head-Jurnal-Transformatif-8(1),-2022-|30-Bappenas-jelaskan-pentingnya-pindah-modal).